BAB II
TARGET DAN LUARAN

Program BLSM yang dikeluarkan oleh pemerinah menelan dana total sebesar Rp12.000.000.000.000. Program BLSM merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi oleh pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang terjadi pada bulan juni 2013 silam. Pemerintah dalam APBN-P 2013 mentargetkan masyarakat yang masih miskin sebesar 10,5% dari total seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi pada bulan Maret silam dalam data yang dirilis oleh BPS jumlah warga negara Indonesia yang miskin masih sebesar 11,37%. Sudah dapat diketahui bahwa program BLSM ini disamping sebagai dana kompensasi atas dikuranginya subsidi untuk bahan bakar minyak juga sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih menembus angka sebesar 11,37%. Pemerintah mengalokasikan dana BLSM sebesar 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima BLSM. Angka tersebut cukup besar dimana dari total keseluruhan rakyat Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 284 juta jiwa.

Program BLSM ini sebenarnya adalah strategi pemerintah yang dipilih karena Kedua langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan fiskal dan mengurangi dampak sosial, dalam hal ini mencegah bertambahnya masyarakat miskin dalam jumlah besar. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah Ph.D, untuk menyelamatkan fiskal, selain penyesuaian harga BBM bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menginstruksikan dilakukannya penghematan belanja kementerian dan lembaga yang bukan prioritas, dan tidak memiliki dampak langsung

terhadap penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan, dan program penting lainnya. Dalam APBN Perubahan 2013 telah dimasukkan program penghematan kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,6 triliun. Pilihan sulit dan tidak populer ini diambil untuk menyelamatkan fiskal dan ekonomi kita agar defisit tidak menjadi besar, dan tidak melanggar Undang-Undang sebesar 3%, jelas Firmanzah. Menurut Firmanzah, kenaikan inflasi dipastikan tidak terhindarkan akibat kenaikan harga BBM itu, dan masyarakat miskin harus dilindungi, dan itu adalah tugas negara untuk memberikan perlindungan agar dampak inflasi bisa diminimilisir pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah dalam program penyelamatan fiskal akan membantu masyarakat kurang mampu. Sebenarnya membantu masyarakat yang kurang mampu itu tugas bersama, tugas negara kepada masyarakat miskin, tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah.

Elemen-elemen di luar pemerintah seperti DPR dan Partai Politik, perlu memahami pentingnya untuk membantu masyarakat miskin. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu mengungkapkan tanpa adanya program kompensasi setiap kenaikan harga premium sebesar 1.500/liter, sesuai hitungan Kementerian Keuangan, angka kemiskinan 2013 akan meningkat 2,61%, ditambah baseline sebesar target 10,5%, jadi angka kemiskinan bisa mencapai 13,11% di akhir 2013. Ia menambahkan, dengan program kompensasi, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan hanya 0,72%, sehingga jika ditambah baseline sebesar target 10,5%, maka angka kemiskinan pada 2013 hanya 11,22%. Dengan pendapat yang diungkapkan staf kepresidenan tersebut makin menjelaskan sebenarnya apa yang ingin di capai oleh pemerintah dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini.

Sumber data Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat utama dalam pembagian BLSM adalah Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K. Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Alur penerimaan data pemegang Kartu Perlindungan Sosial dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh TNP2K, setelah itu basis data yang telah terdaftar di TNP2K dilanjutkan dengan memverifikasi data yang dilakukan oleh Kemensos, setelah data BLSM valid barulah data dikirim kepada PT.Pos. Jika ingin lebih jelas alur penerimaan data KPS dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Alur Penerimaan Data KPS



Sumber : PT. Pos Indonesia, 2013

Gambar diatas dijelaskan bahwa alur pendataan untuk penerima Kartu Perlindungan Sosial. TNP2K selaku pihak yang bertugas untuk mengatasi percepatan kemiskinan mendata seluruh warga negara yang berhak untuk menerima BLSM, setelah pendataan selesai di TNP2K jumlah data penerima itu diberikan kepada Kementrian Sosial lalu di verivikasi lagi di Kmensos setelah di verivikasi data KPS untuk menerima BLSM di berikan kepada PT. Pos untuk tekhnis pembagian dana BLSM ke seluruh Indonesia.

2.1 Kartu Perlindungan Sosial

KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pendamping Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga, Alamat Rumah Tangga, dilengkapi dengan kode batang beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo burung Garuda.

Gambar 2.2
Kartu Perlindungan Sosial



Sumber: PT. Pos Indonesia, 2013

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia.

Pemerintah pusat berpendapat bahwa implementasi pembagian dana bantuan sosial BLSM kali ini lebih tertata dan terproses jika dibandingkan dengan pembagian BLT pada 2004 silam. Pembagian BLSM yang disalurkan oleh PT. Pos lebih siap, baik dalam penyaluran dana maupun dalam penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Mereka mampu menyalurkan secara langsung dana yang diperuntukan dari pemerintah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

2.1.1 Syarat dan Ketentuan

Adapun syarat dan ketentuan warga negara Indonesia yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial yaitu:

1. Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan Kartu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu
3. Penerima Program Perlindungan Sosial harus dapat menunjukan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program
4. Kartu tidak dapat dipindahtangankan
5. Nomor Kartu Keluarga yang tercantum pada KPS tidak menjadi persyaratan utama bagi penerima kartu untuk memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial

2.1.2 Manfaat Kartu Perlindungan Sosial

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

2.1.3 Cara Penyampaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

adalah KPS diantar langsung oleh PT Pos Indonesia (Persero) ke Rumah Tangga Sasaran sekitar bulan juni 2013, tanpa dikenai biaya apapun.

2.1.4 Sumber Data Kartu Perlindungan Sosial

Adalah data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan

Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keakuratan data RTS, metodologi pendataan RTS disempurnakan, yang mana penyempurnaan metodologi tersebut dikoordinasikan oleh TNP2K.Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K untuk diolah sehingga menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian dikelola sebagai Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Kartu Perlindungan Sosial merupakan kartu yang wajib untuk dibawa pada saat pembagian BLSM disamping Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang dimiliki oleh penerima dana. Pembagian kartu ini dilakukan pada setiap kecamatan yang di delegasikan kepada kelurahan atau desa.

Penerima Kartu Perlindungan Sosial di Cibereum diberikan langsung melalui PT. Pos akan tetapi melalui Desa. RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang berhak menerima KPS dapat mengambil di Balai Desa. Di Desa Cibereum penyeleksian penerima BLSM ditentukan sendiri melalui mekanisme musyawarah antar RW dalam penentuan apakah layak RTS yang menerima KPS tersebut. Jika tidak, RW menjadi tempat untuk bermusyawarah dalam pergantian data dan di retur kembali

kepada PT. Pos melalui desa. jadi desa hanya dalam kapasitas mengawasi saja.

Dalam pembagian BLSM yang penulis amati di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung total penerima bantuan ini sebanyak 2.045 warga penerima dari total jumlah 15.576 warga yang berdomisili di Desa Cibereum. Mayoritas warga penerima BLSM merupakan buruh tani karena Desa Cibereum merupakan daerah dengan kontur tanah perbukitan dan pegunungan. BLSM yang diterima oleh masyarakat Desa Cibereum kebanyakan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari karena nominalnya yang tidak besar pula maka cukup untuk kebutuhan dapur saja, itupun menurut sebagian RTS dana tersebut tidak cukup.